

Strategi dan Koordinasi Kebijakan Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana (Studi Kasus Bencana Longsor dan Kabut Asap)

Nurrokhmah R; Ratri Candra R; Fathia H; Djamang Ludiro, Tjong Giok Pin
Pusat Penelitian Geografi Terapan (PPGT)

FMIPA Universitas Indonesia

PERMASALAHAN

Indonesia memiliki kondisi yang memungkinkan terjadinya bencana baik karena faktor iklim, tektonik, vulkanik maupun demografis yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda dan dampak psikologis. Pada tahun 2015 ini Indonesia mengalami musim kemarau yang berkepanjangan sebagai akibat dari peristiwa EL Nino yang ditandai dengan naiknya suhu air laut di Samudera Pasifik yang lebih panas daripada biasanya. Kejadian El Nino yang lebih ekstrim tersebut telah mengakibatkan bencana-bencana yang berantai, seperti kebakaran hutan dan lahan gambut di berbagai tempat di Indonesia yang tidak terkendali dan berimbas pada munculnya kabut asap dan permasalahan kekeringan.

Beberapa institusi pemerintah terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap upaya penanggulangan bencana sebelum maupun setelah diberlakukannya Undang-Undang No.24 Tahun 2007, antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri. Namun permasalahan timbul karena instansi-instansi pemerintah tersebut kurang terkoordinir yang menyebabkan upaya penanganan bencana menjadi tidak efektif dan efisien.

LINGKUP DAN PENDEKATAN KAJIAN

Indonesia memiliki karakteristik ekosistem beragam yang dapat menghasilkan sistem nilai dan budaya yang beragam. Jika dikaitkan dengan bencana maka salah satu hal yang dapat dilihat terkait masyarakat adalah sistem nilai, norma, adat, pamali, dan kearifan budaya. Hal yang akan dibahas pada kajian kali ini terkait kondisi masyarakat di wilayah bencana adalah mengenai faktor-faktor kausatif bencana longsor dan kebakaran lahan dan hutan (kabut asap). Selain itu juga akan dikaji terkait kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan kedua kebijakan tersebut, akan dilihat peran serta masyarakat di dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kemudian akan dirumuskan penguatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana. Dalam proses penguatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana, ada dua hal yang dijadikan dasar pertimbangan yaitu landasan teori penguatan kapasitas masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan kontekstualisasi konsep revolusi mental untuk pelestarian lingkungan hidup. Ilustrasi Pendekatan Kajian "Strategi dan Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana Bidang Penguatan Kapasitas Masyarakat" dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS KAPASITAS DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pada program penguatan kapasitas masyarakat, dasar utama tujuannya adalah menciptakan perubahan social dalam masyarakat menuju arah yang lebih baik pada bidang tertentu. Perubahan social adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima, akibat adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideology, maupun karena difusi dan penemuan baru dalam masyarakat.



Gambar 2. Kerangka program penguatan kapasitas masyarakat



Gambar 3. Tahapan Perubahan Sosial dalam Penguatan Kapasitas Masyarakat

Apabila kerangka di atas digunakan untuk menelaah sejumlah tujuan program kementerian/lembaga terkait penguatan kapasitas maka diperoleh rumusan sebagaimana terlihat dalam gambar 3.

KEMITRAAN DAN KOORDINASI KEGIATAN Penguatan KAPASITAS DALAM PRB

Kemitraan kementerian/lembaga dalam program penguatan kapasitas masyarakat diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan mensinergikan program dalam hal ini pengurangan risiko bencana. Merujuk Kerangka Kerja Sendai maka stakeholder yang belum dioptimalkan masuk dalam kemitraan kementerian/lembaga dalam program penguatan kapasitas masyarakat adalah masyarakat akademi, peneliti dan komponen risetnya. Masyarakat akademi di Indonesia merupakan entitas yang besar dan sangat berpotensi mendukung optimalisasi capaian program.

TANTANGAN KEGIATAN Penguatan KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Hal yang menjadi tantangan implementasi program penguatan kapasitas masyarakat diantaranya adalah **koordinasi dan sinkronisasi program pada Kementerian/Lembaga (K/L) masih kurang terpadu, sehingga masih ditemui program yang mengulang atau serupa**. Fungsi koordinasi ini dapat lebih dimantapkan dengan adanya fungsi kementerian koordinator untuk setiap program dari kementerian teknis.

Selain itu, **kejelasan kewenangan dan proses koordinasi antara pusat dan daerah** juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program ini. Penjabaran hasil harmonisasi program di tingkat pusat harus dapat diturunkan ke daerah dengan memperhatikan kondisi lokalnya. Demikian pula mengenai upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, harus didesain sedemikian rupa dapat memperhatikan kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten kota.

Tantangan lainnya adalah **belum adanya pedoman atau model pelaksanaan pendidikan pengurangan risiko bencana yang berlaku secara nasional**. Tantangan lain yang dihadapi dalam pengurangan risiko bencana adalah **keterbatasan pendanaan**, mengingat anggaran lebih banyak dialokasikan untuk program penanggulangan bencana. **Masih lemahnya kesadaran sebagian besar masyarakat terhadap pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana** menjadi tantangan yang dihadapi bersama. Harus ada keinginan umum/masyarakat untuk mengadakan perubahan.

Untuk menjawab tantangan yang berasal dari masyarakat, hendaknya ada seseorang/sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat. Pemimpin tersebut nantinya mampu menampung keinginan dan aspirasi warga yang dirumuskan sejalan dengan program penguatan kapasitas.

STRATEGI KOORDINASI PENGURANGAN RISIKO BENCANA BIDANG Penguatan KAPASITAS MASYARAKAT

Secara umum kegiatan penguatan kapasitas penduduk dalam mekanisme penurunan risiko bencana dapat dibagi menjadi berbagai kegiatan dasar, yaitu:

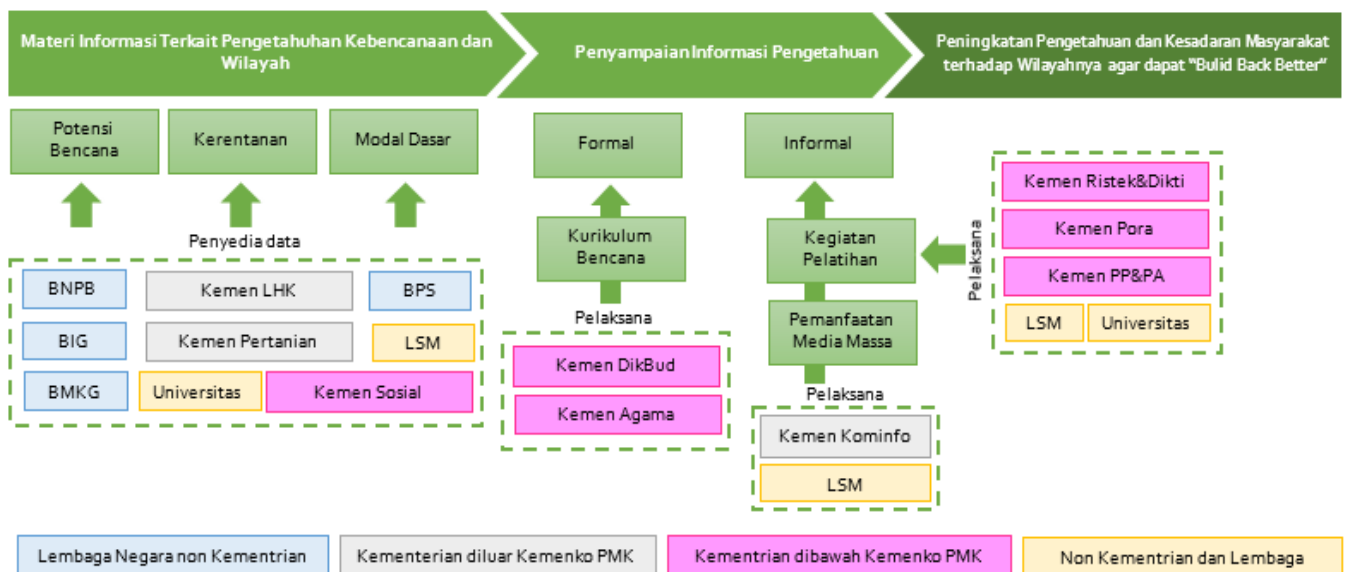
1. Langkah awal pengelolaan pengurangan risiko bencana adalah melakukan **kajian ancaman atau potensi bencana alam** yang ada disekitar masyarakat baik dari jenis, tingkat risiko, frekuensinya waktu dan lamanya, wilayah yg terkena, serta perkembangan dan bahaya ikutannya.
2. Kajian selanjutnya adalah **kajian kerentanan** yaitu mengidentifikasi lokasi yang rawan bencana, siapa yang paling rentan ketika bencana terjadi baik dari status sosial-ekonomi, gender, umur dan lain-lain. Selain mengidentifikasi manusia juga melakukan identifikasi sumberdaya alam

lainnya yang rentan terkena dampak bencana seperti keragaman hayati, dan lingkungan hidup.

3. Kemudian dilakukan **kajian kemampuan atau kapasitas masyarakat** terhadap antisipasi bencana yang mungkin datang. Kajian ini dilakukan untuk memetakan kekuatan dan sumber-sumber yang dimiliki oleh perorangan, rumah tangga, dan komunitas, yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, siap siaga, menanggapi dengan cepat atau segera pulih dari bencana.
4. Terakhir melakukan **kajian pemangku kepentingan (stakeholders)** untuk menganalisis peran dan partisipasi lembaga-lembaga, baik pada tahap manajemen krisis maupun manajemen risiko.

ALUR KOORDINASI PENGURANGAN RISIKO BENCANA BIDANG PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT

Alur Koordinasi yang dapat dilakukan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait peningkatan kapasitas didominasi pada kegiatan yang melibatkan softskill setiap stakeholder yang terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana, baik secara langsung maupun tidak langsung. Telah dikatakan sebelumnya bahwa terdapat tiga kegiatan penting dalam kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana untuk menurunkan risiko. Alur koordinasi yang dapat dilakukan Kemenko PMK akan dikerucutkan pada dua kegiatan penting tersebut.



Gambar 4. Alur Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana Bidang Penguatan Kapasitas Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Capacity for Disaster Reduction Initiative (CaDRi). *Basics of Capacity for Disaster Risk Reduction*.

Gautam, Dhruva Raj. 2009. *Community – Based Disaster Risk Reduction: Good Practice*. Mercy Corps: Nepal.

International Strategy for Disaster Reduction (ISDR). 2008. *Indigenous Knowledge for Disaster Risk Reduction: Good Practices and Lessons Learned from Experiences in The Asia-Pacific Region*.

John Hopkins and The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. 2008. *Public Health Guide in Emergencies*.

Muhari, Abdul, et al. 2011. *Belajar dari Bencana Jepang 11.03.2011, Gempa Bumi – Tsunami – Radiasi Nuklir*. Institute for Science and Technology Studies (ISTECS): Jepang.

Nugroho, Sutopo P. 2015. *Belum Ada Penetapan Bencana Sebagai Bencana Nasional* dalam : <http://www.bnpb.go.id/berita/2613/belum-ada-penetapan-bencana-asap-sebagai-bencana-nasional>.

Triyono, S.Si dan Ahmad Arief, ST. 2003. *Modal Sosial Sebagai Mainstream Pengembangan Masyarakat Pesisir: Sebuah Pendekatan Sosial untuk Mendukung Pembangunan Lokal Tipologi Masyarakat Pesisir*. Jurnal Prosiding Nasional Fakultas Geografi UGM

UNDP, Bureau for Crisis Prevention and Recovery. 2010. *Capacity Development for Disaster Risk Reduction*. UNDP.

Upe, Ambo. 2012. *Tipologi Desa* dalam <http://lensasosiologi.blogspot.co.id/2012/03/tipologi-des.html>.

Undang - Undang No. 24 Tahun 2007.

Karki, Sameer. 2002. *Community Involvement in and Management of Forest Fires in South East Asia*. Jakarta: Project FireFight South East Asia